

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang mempunyai kompleksitas permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian serta penanganan yang serius. Hingga saat ini, permasalahan utama bangsa Indonesia adalah masalah kemiskinan. Data Biro Pusat Statistik (BPS) menunjukkan telah terjadi penurunan angka kemiskinan dalam 10 tahun terakhir - pasca krisis moneter 1997/1998. Namun secara absolut, pada tahun 2007 angka kemiskinan masih cukup tinggi yaitu 37,17 juta jiwa atau 16,58 % (Media Indonesia, 22 Oktober 2007). Dalam Laporan Tahunan Pembangunan Manusia 2006 (yang dikeluarkan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB), dengan prediksi angka kemiskinan yang masih cukup tinggi tersebut menunjukkan adanya kemerosotan kualitas hidup manusia Indonesia sehingga menempatkan Indonesia pada posisi terburuk negara-negara yang terancam gagal mencapai target *Milenium Development Goals* (MDGs) tahun 2015 (Kompas, 9 November 2006). MDGs merupakan program PBB yang memberi perhatian pada masalah-masalah kemiskinan, kesehatan dan lainnya.

Tidak dipungkiri, masalah kemiskinan harus mendapat perhatian dan dicari solusinya mengingat masalah kemiskinan dapat menjadi pemicu munculnya masalah sosial lainnya seperti busung lapar dan gizi buruk, kematian, meningkatnya angka putus sekolah hingga tindak kriminal.

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini - sebagaimana yang diamanatkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) - tidak sedikit upaya telah dilakukan pemerintah. Namun upaya tersebut tampaknya belum berjalan dengan baik – kalau tidak ingin dikatakan gagal. Pembangunan yang bertumpu pada pembangunan ekonomi dengan meningkatkan *Growth National Product* (GNP) – yang dilakukan selama ini – di satu sisi telah menciptakan kemakmuran pada

sebagian masyarakat namun juga meninggalkan banyak permasalahan yang berakar pada kemiskinan pada masyarakat lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan ternyata belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat terutama masyarakat lapisan bawah.

Untuk dapat mengatasi permasalahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tersebar di pelosok nusantara ini maka diperlukan pelibatan berbagai pihak. Undang-undang No. 6 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Sosial mengisyaratkan bahwa kesejahteraan sosial harus diupayakan bersama oleh seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah (www.unmit.org). Lebih lanjut dikatakan, dalam perspektif negara modern terdapat 3 pilar yang berperan dalam pembangunan bangsa yaitu pemerintah, dunia usaha dan masyarakat (Nursahid, 2006: 5). Ini berarti upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi tanggung jawab bersama. Salah satu diantaranya adalah dunia usaha. Secara teoritis konsep peran dunia usaha ini mendapat pijakan relatif kuat karena dalam kenyataannya pemerintah tidak selamanya bisa menjalankan kesejahteraan masyarakat secara memuaskan (Djalil, 2003: 4-5). Hal ini tentu terkait dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah. Salah satu bentuk kepedulian perusahaan di bidang sosial ini diwujudkan dalam bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP).

Saat ini, telah banyak dunia usaha yang mewujudkan kepedulian pada masyarakat melalui program TSP. TSP merupakan suatu topik etika bisnis yang banyak dibicarakan dan diperdebatkan kehadirannya, di tingkat filosofis-teoritis dan di tingkat praktis.

Perdebatan tentang TSP yang belakangan ini menjadi sorotan adalah dengan diberlakukannya UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) yang memberlakukan TSP pada dunia usaha yang bergerak di bidang sumber daya alam - terutama mengenai pasal 74. Kritikan terhadap UU PT ini lebih diarahkan pada masuknya aspek "kewajiban" dan "sanksi hukum." Ini berarti sebagai sebuah tanggung jawab moral-sosial, UU PT telah mengabaikan suatu makna dasar TSP sebagai suatu pilihan sadar, adanya kebebasan dan kemauan berkehendak (Suara Pembaruan, 1 Agustus 2007). Selain itu, dari sisi

perusahaan - terkait dengan pembiayaan TSP yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan - UU PT akan menurunkan daya saing perusahaan karena akan menjadi beban tambahan perusahaan (ibarat tambahan pajak/PPh). Akibatnya, UU PT juga akan menciptakan iklim yang tidak kondusif untuk kelanjutan usaha dalam negeri dan akhirnya akan meningkatkan angka pengangguran (Bisnis Indonesia, 16 Juli 2007).

Secara umum, TSP merupakan bentuk kepedulian perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan alam – sebagaimana dikemukakan Elkington (1997) sebagai *triple bottom line* - yaitu menyelaraskan orientasi perusahaan antara mencari keuntungan (*profit*), perhatian pada masyarakat (*people*) dan lingkungan alam (*planet*) dalam porsinya yang seimbang (Pambudi dalam Nugraha, 2005: 19). Diharapkan model ini akan menjadi filosofi dan motor penggerak perusahaan. Filosofi ini yang dikenal kemudian dengan TSP.

Meskipun kehadiran TSP masih menjadi sorotan hingga kini – baik yang mendukung maupun yang menolak kehadiran TSP – namun kehadirannya mendapatkan dukungan internasional. Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) telah mendeklarasikan *Global Compact* pada tahun 2000 yang mengajak dunia usaha untuk menjalankan nilai-nilai *Global Compact* antara lain perhatian pada nilai-nilai hak asasi manusia dan pelestarian lingkungan (www.ima.or.id). Dengan demikian, *global compact* dapat menjadi penggalang kekuatan internasional dalam mendukung keterlibatan perusahaan-perusahaan untuk memperhatikan kepentingan masyarakat dan lingkungan alam.

Saat ini kepedulian perusahaan pada masyarakat sudah mendapat perhatian dari perusahaan dengan menjalankan TSP. Pelaksanaan TSP tidak dipungkiri memberi manfaat baik bagi perusahaan maupun masyarakat sebagai penerima bantuan.

Bagi perusahaan, TSP mampu membentuk persepsi positif masyarakat terhadap perusahaan sehingga dapat meningkatkan citra perusahaan. Dari beberapa survey yang dikutip Kotler memperlihatkan bahwa masyarakat akan mendukung

dan membeli suatu produk dari perusahaan yang mempunyai kepedulian sosial, sebaliknya mereka akan menolak produk dari perusahaan yang tidak mempunyai rasa kepedulian sosial (Kotler, 2005: 11-17). Hal senada juga terungkap dari hasil survey CSR 2005 yang menunjukkan manfaat TSP yaitu mampu meningkatkan citra perusahaan dan menjalin hubungan baik dengan masyarakat (Pambudi, 2005:41). Dengan terbangunnya citra positif perusahaan di mata masyarakat diharapkan ada penerimaan masyarakat dan akhirnya dapat menciptakan kesinambungan jalannya perusahaan.

Dengan adanya manfaat TSP ini, terlihat cukup banyak perusahaan yang menjalankan program kepedulian sosialnya dengan alokasi dana yang tidak sedikit nilainya – belum termasuk sumbangan dalam bentuk *in-kind* (natura) seperti makanan, pakaian, layanan kesehatan dan lainnya (Saidi, 2003: 83-85). Begitu pula dengan hasil survey Swa (2005) yang menunjukkan keseriusan perusahaan dalam menjalankan TSP dengan memasukkan TSP secara tersurat dalam visi, misi dan kebijakan perusahaan, dan untuk efektifitas pelaksanaan TSP juga dilakukan evaluasi program. Bahkan program yang dilakukan telah mencakup – apa yang disebut dengan *triple bottom line* - yaitu meliputi bidang sosial, ekonomi dan lingkungan (Pambudi 2005: 38-41). Ini berarti, TSP tidak lagi dipandang sebelah mata namun sudah menjadi kebijakan dan strategi bisnis perusahaan – yang sama pentingnya dengan kebijakan perusahaan dalam mencari keuntungan (*profit*).

Di lain pihak, TSP juga memberi manfaat nyata pada masyarakat. Bagi masyarakat, TSP dapat membantu dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan sosialnya berupa bantuan *in-kind* (natura) seperti makanan, pakaian, produk kesehatan serta obatan-obatan bagi korban bencana, bantuan pengembangan ekonomi masyarakat serta bantuan pelestarian alam di sekitar lingkungan perusahaan. Dengan demikian, masyarakat merasa nyaman hidup berdampingan dengan dunia usaha tersebut.

Salah satu sektor usaha yang turut membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan TSP-nya adalah dunia industri yang cukup banyak tersebar di Indonesia. Dunia industri diharapkan mempunyai kepedulian yang tinggi pada

masyarakat sekitar mengingat lingkungan kerjanya yang sangat bersentuhan dengan kepentingan masyarakat sekitar dan sarat dengan masalah seperti pencemaran lingkungan dan kesenjangan sosial. Hal ini bisa dilihat dari maraknya aksi demonstrasi masyarakat di sekitar industri tersebut (Wahjoedi,2004:6).

Salah satu usaha yang bergerak di bidang industri ini adalah PT Pertamina Geothermal Energy – sebagai anak perusahaan PT Pertamina (Persero) Direktorat Hulu - yang tergabung dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Peran PT Pertamina (Persero) dalam menjalankan TSP didorong oleh adanya peraturan berikut. Pertama, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) yang mengamanatkan setiap perusahaan migas wajib melakukan pengembangan masyarakat dan lingkungan sekitar (www.temppointeraktif.com). Kedua, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Keputusan Menteri (Kepmen) BUMN Nomor 236/MBU/2003 yang mengamanatkan PT Pertamina (Persero) melakukan pembinaan terhadap masyarakat sekitar termasuk pembinaan terhadap usaha kecil/koperasi. Ketiga, kehadiran Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) semakin memperkuat dorongan Pertamina untuk menjalankan TSP.

Merujuk Kepmen BUMN No.236/MBU/2003, dalam perkembangannya TSP di PT Pertamina diwujudkan dalam Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Program Kemitraan merupakan bantuan pinjaman dana bagi mitra binaan seperti koperasi, Koperasi Unit Desa (KUD), Unit Usaha Kecil baik perorangan maupun kelompok. Sedangkan program Bina Lingkungan dilakukan melalui berbagai bantuan seperti bantuan sosial untuk korban bencana alam, bantuan keagamaan, bantuan pendidikan, bantuan kesehatan dan bantuan fasilitas/sarana perhubungan. Tentang bentuk bantuan perusahaan ini disampaikan oleh Saidi (2003:22-23) bahwa orientasi kedermawanan sosial perusahaan dikelompokkan dalam 2 kategori yaitu bantuan yang bersifat *charity* dan bantuan *philantropy*. Keduanya, meskipun mempunyai makna keikhlasan memberi, namun mempunyai arti yang berbeda. *Charity* biasanya ditujukan untuk bantuan yang bersifat pemenuhan kebutuhan sesaat seperti bantuan Bina Lingkungan. Sementara bantuan *philantropy* lebih bermakna luas dan mengarah ke investasi sosial. Sebagai kegiatan

yang mengarah ke investasi sosial, *philantropy* diharapkan mampu menghasilkan penguatan masyarakat. Mengutip Saidi (2003:23):

“Philantropy is about teaching people how to fish, as opposed to giving people fish to eat. Philantropy for social investment has longer gestation periode, and is a more difficulty to undertake than charity”

(*Philantropy* adalah tentang mengajarkan masyarakat bagaimana memancing, sebagai lawan dari memberikan masyarakat ikan untuk dimakan. *Philantropy* sebagai investasi sosial membutuhkan waktu, dan lebih sulit dilakukan dari pada *charity*)

Definisi di atas menunjukkan bahwa bantuan yang bersifat *philantropy* lebih bermakna sebagai investasi jangka panjang bagi masyarakat dan memberi peluang masyarakat untuk meningkatkan kemandiriannya melalui pemberdayaan. Dengan kemandirian ini diharapkan masyarakat dapat mengatasi permasalahan hidup. Salah satu bentuk bantuan *philantropy* ini adalah peningkatan peluang ekonomi melalui bantuan pinjaman dana untuk pengembangan usaha kecil – seperti yang dilakukan PT Pertamina melalui bantuan Program Kemitraan.

Sesuai dengan UU Usaha Kecil Nomor 9/1995, dunia usaha dituntut berperan dalam membina dan mengembangkan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri sehingga mampu bersaing dalam percaturan ekonomi. Menurut Saefuddin, pembinaan usaha kecil mampu memperluas lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat (Saefuddin,1996: 15-16). Hal ini terbukti dari data Depkop dan PKM (1998) yang menunjukkan bahwa usaha kecil mendominasi sektor-sektor usaha yang ada dengan penyerapan tenaga kerja yang dominan dari jumlah angkatan kerja yang ada. Selain ini, dengan modal yang relatif kecil sehingga mudah beralih usaha membuat usaha kecil mampu bertahan di saat krisis ekonomi lalu (Ariawati,2003: 52). Dengan demikian, program pengembangan ekonomi masyarakat ini diharapkan dapat menjadi jawaban terhadap program pembangunan selama ini yang lebih bersifat padat modal dan menciptakan kesenjangan sosial. Dunia usaha yang tersebar di berbagai pelosok nusantara ini diharapkan mampu mengurangi pengangguran dan pada akhirnya

menciptakan pertumbuhan ekonomi , kesejahteraan masyarakat di lingkungan usahanya dan pemerataan melalui program pengembangan usaha kecil.

Terkait dengan TSP, telah banyak penelitian dilakukan tentang pelaksanaan TSP di berbagai perusahaan. Namun penelitian tersebut cenderung melihat pada program *charity* berupa bantuan sosial perusahaan. Dari penelusuran studi pustaka ini pula, penulis menemukan dua penelitian yang mengkaji bantuan yang bersifat pemberdayaan masyarakat melalui program kemitraan dengan usaha kecil di perusahaan BUMN.

Penelitian Ariesandi (2002) melihat pelaksanaan program bantuan kepada usaha kecil (Pembinaan Usaha Kecil dan koperasi/PUKK) dan Zulfikar (2002) mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu usaha kecil. Kedua penelitian tersebut cenderung melihat aspek pelaksanaan suatu program dan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program pengembangan usaha kecil yang dilakukan perusahaan (lihat Tabel 1).

Berdasarkan penelitian tersebut penulis tertarik untuk melihat lebih jauh lagi yaitu bagaimana peran/partisipasi masyarakat - dalam hal ini usaha kecil - dalam program pengembangan usaha kecil yang dilakukan perusahaan.

Partisipasi tampaknya menjadi hal penting dalam pelaksanaan suatu program. Hasil penelitian Jahya (2004: 129-131) yang meneliti tentang efektifitas pelaksanaan TSP PT Berau Coal di Kalimantan Timur menemukan bahwa bantuan – dalam hal ini bantuan *charity* - yang diberikan telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat (63 %). Berdasarkan pengalaman lapangan, Jahya memberikan masukan perencanaan sosial bagi pelaksanaan TSP yang dikembangkan melalui manajemen *Community Development* (CD) yang kolaboratif dengan mengedepankan antara lain: Pemberdayaan masyarakat dengan membentuk kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk lebih menyerap aspirasi masyarakat yang beragam (dengan difasilitasi oleh *Community Development Officer* / CDO bagi kelompok baru); Melibatkan masyarakat dalam monitoring (meskipun baru pada kegiatan pengembangan ekonomi) setiap bulannya; dan Evaluasi kegiatan bersama masyarakat untuk mendapatkan masukan bagi perbaikan perencanaan berikutnya. Tentang pelaksanaan program TSP di PT Berau Coal ini telah membawa PT Berau Coal menjadi pemenang kategori sosial, kategori ekonomi dan kategori lingkungan dalam CSR Award 2005 (Pambudi, 2005: 34). Keberhasilan ini sangat didukung oleh adanya partisipasi masyarakat dalam program tersebut.

Begitu pula dengan Irvan (2004: 146-149) yang melakukan penelitian di salah satu daerah operasi PT Pertamina Direktorat Hulu yaitu di Bajubang (Jambi). Meskipun pelaksanaan TSP mendapat respons positif dari masyarakat namun Irvan merekomendasikan pelaksanaan partisipasi masyarakat mengingat rendahnya peran masyarakat – yaitu sebatas pelibatan peran ketua RT/RW setempat dalam persiapan dan pelaksanaan program. Sehingga dapat dikatakan bahwa posisi masyarakat dalam suatu program hanya sebagai ”penerima” bantuan semata. Walaupun program TSP ini mendapat respons positif dari masyarakat, namun dari hasil wawancara *in-depth* dengan responden muncul keluhan masyarakat seperti bantuan tidak sesuai dengan kebutuhan mereka, mereka lebih menginginkan

sesuatu yang bisa membuat mereka mandiri, serta banyak bantuan yang diberikan tidak mendapat respons dan kurang terpelihara karena mereka menganggap bantuan tersebut kurang bermanfaat seperti bantuan panggung ”tujuh belasan” di Bajubang (Irvan, 2004: lihat halaman lampiran).

Dengan demikian, dari keluhan masyarakat tersebut bisa dipertanyakan tentang bantuan TSP yang selama ini diberikan pada masyarakat: bagaimana keberlanjutan dari bantuan yang diberikan?, bagaimana nasib masyarakat jika tidak mendapat pembinaan dengan baik?, bagaimana jika perusahaan sudah tidak beroperasi lagi di wilayah tersebut? Sebaliknya, dari sisi perusahaan juga perlu dipertanyakan bagaimana dengan bantuan perusahaan yang nilainya tidak sedikit? Tentunya, hal-hal tersebut perlu diperhatikan agar bantuan TSP, apa pun bentuknya dan berapa pun nilainya, tidak menjadi bantuan yang sia-sia – baik bagi perusahaan sebagai pemilik program dan dana, serta masyarakat sebagai penerima bantuan .

Berdasarkan uraian di atas, terlihat pentingnya partisipasi dalam suatu program. Ada beberapa alasan penulis untuk mengangkat peran partisipasi dalam kegiatan TSP ini khususnya di program bantuan usaha kecil yaitu:

1. Penelitian-penelitian di atas lebih melihat pelaksanaan TSP sehingga cenderung melihat TSP dari kaca mata perusahaan sebagai pemilik dan pelaksana program. Akibatnya penelitian tersebut kurang melihat aspek respons masyarakat terhadap pelaksanaan TSP seperti penerimaan masyarakat, kepuasan dan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan TSP.
2. Karena penelitian tersebut tidak secara khusus memfokuskan pada peran partisipasi dalam program TSP maka penelitian tersebut tentu tidak melihat bagaimana proses partisipasi dalam pelaksanaan TSP. Meskipun demikian, Jahya dan Irvan telah merumuskan suatu konsep perencanaan sosial dan konsep program *community development* yang efektif yang diangkat dari kondisi masyarakat setempat serta merekomendasikan perlunya partisipasi masyarakat dalam perencanaan sosial dan tahapan kegiatan TSP agar program berjalan efektif, bermanfaat bagi masyarakat dan perusahaan.

Untuk itu, dalam penelitian ini, penulis mencoba memfokuskan pada partisipasi masyarakat khususnya dalam program pemberdayaan masyarakat yaitu melalui Program Kemitraan dengan usaha kecil di PT Pertamina Geothermal Energy. Partisipasi masyarakat menjadi penting untuk diimplementasikan mengingat beberapa pertimbangan di bawah ini:

1. Perhatian pada kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan aspirasi masyarakat sudah menjadi komitmen perusahaan yang dituang dalam asas-asas yang dijadikan pedoman pelaksanaan TSP yang meliputi: a. Komitmen yang tinggi dari manajemen Pertamina, b. Proses *bottom up* berdasarkan prioritas kebutuhan nyata masyarakat setempat, c. Memberikan manfaat strategis bagi perusahaan dan masyarakat, d. Memberikan bantuan di saat krisis dan musibah, serta upaya pemberdayaan masyarakat sebagai antisipasi dinamika perubahan sosial, ekonomi dan budaya sebagai dampak kehadiran perusahaan (Baik, 2007).
2. Sebagai sebuah perusahaan nasional besar dengan area cakupan dari Sabang hingga Merauke, kurangnya pelibatan masyarakat tentu akan berdampak pada citra perusahaan dan kelangsungan usahanya. Dengan tidak adanya partisipasi masyarakat, tidak tertutup kemungkinan akan munculnya ketidak-puasan masyarakat yang akan terwujud dalam bentuk demonstrasi dan penolakan masyarakat terhadap perusahaan.

B. Permasalahan

PT Pertamina sangat memberi perhatian besar terhadap perkembangan usaha kecil melalui Program Kemitraannya. Selama tahun 2004 lalu, PT Pertamina (Persero) Direktorat Hulu telah mengalokasikan dana pinjaman modal melalui Program Kemitraan sebesar Rp.19.148.762.948, sementara untuk bantuan program Bina Lingkungan sebesar Rp. 12.079. 064.106. Bahkan di PT Pertamina Geothermal Energy, jumlah dana bantuan Program Kemitraan Area Kamojang merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan area operasi lainnya (2004 Upstream Pertamina Annual Report PT Pertamina (Persero) Upstream Direktorat).

Bantuan PT Pertamina (Persero) Direktorat Hulu ini selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini berbeda dari hasil penelitian/survey media selama tahun 2001 yang menunjukkan alokasi dana untuk kegiatan ekonomi produktif ini - dibanding dengan dana bagi bantuan-bantuan lainnya - masih rendah (Saidi,2003:98). Hal ini menunjukkan kepedulian Pertamina terhadap masyarakat khususnya perkembangan usaha kecil.

Besarnya perhatian pada perkembangan usaha kecil juga terlihat dari data Departemen Koperasi (2006). Dari data tersebut terlihat populasi usaha kecil mencapai 99,77 % dengan penyerapan tenaga kerja sekitar 91,14 % dari semua jenis usaha (usaha kecil, menengah dan besar) yang ada di Indonesia. Sebagai pembanding, penyerapan tenaga kerja di unit usaha menengah sebesar 5,05 % dan unit usaha besar sekitar 3,81 % (www.depkop.go.id).

Untuk perkembangan usaha kecil - khususnya usaha kecil kulit - di kabupaten Garut (sebagai salah satu wilayah binaan PT Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang) terdapat 283 sentra industri, 11.297 unit usaha (dengan 912 unit/8,07 % bergerak di bidang kulit) dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 53.873 orang (dengan 8380 orang/15,56 % tenaga kerja di bidang kulit) dan penyerapan investasi sebesar Rp. 70.684.442.000 (Garut Dalam Angka 2006, BPS). Berdasarkan data Potensi Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Garut tahun 2007, terdata 1022 usaha kecil di bidang kulit (sekitar 8,89 % dari total usaha kecil yang ada) dengan 6519 tenaga kerja (11,95 % dari total tenaga kerja yang ada) (Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Garut, 2007). Industri kulit ini menjadi satu dari enam komoditi unggulan di kabupaten Garut - selain dodol, sutera alam, minyak akar wangi, batik dan anyaman bambu - jika dilihat dari jumlah usaha kecilnya, penyerapan tenaga kerja, nilai investasi dan nilai produksi yang dihasilkan. Tentang perkembangan usaha kecil kulit ini disampaikan pula oleh Lurah Kota Wetan kabupaten Garut:

”Minat terhadap perkembangan usaha kecil di sini besar. Banyak yang ikut program usaha kecil dan banyak juga perusahaan yang bantu, juga program bantuan dari dinas-dinas. Data yang pasti tentang usaha kecil tidak ada namun secara kasat mata terlihat perkembangan usaha kecil, meski pelan. Ada 232 unit usaha kecil kulit di sini (tahun 2006)” (HSG, 26 Februari 2008).

Gambaran di atas menunjukkan minat yang besar terhadap usaha kecil. Di kabupaten Garut khususnya di kelurahan Kota Wetan, usaha kecil perajin kulit ini menjadi komoditi unggulan dan mendapat perhatian pemerintah daerah dan dunia usaha. Salah satunya adalah Program Kemitraan PT Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang. Sejak dimulainya program bantuan pinjaman dana bagi usaha kecil ini (1993 – 2007) sudah memberikan bantuan kepada 903 mitra binaan. Namun dalam perkembangannya terdapat 501 mitra binaan yang masih berjalan (112 dengan kredit lancar dan 389 dengan kredit macet yang masih perlu pembinaan) dan 402 mitra binaan sisanya gagal dalam usahanya. Di sini terlihat cukup banyak usaha kecil yang gagal.

Mengutip pendapat Hikmat (2004:95), ada beberapa faktor yang disinyalir sebagai penyebab gagalnya suatu program pembangunan. Pertama, karena terjadi kesalahan dalam menentukan kelompok sasaran dan ”pemaksaan” jenis usaha ekonomi sebagai sumber penghasilan yang mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan sekitar. Kedua, sistem pelaksanaan program bersifat sentralistik di mana program dibuat oleh pusat dengan berpedoman pada petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) sebagai acuan di daerah dan sifatnya mengikat.

Selain itu, terdapat 2 pandangan senada tentang faktor-faktor penyebab kegagalan suatu program pembangunan yaitu: (www.duniaesai.com/ekonomi/Eko41.htm).

1. Program penanggulangan kemiskinan selama ini cenderung memfokuskan pada penyaluran bantuan sosial seperti sumbangan bantuan beras dan Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk orang miskin. Bentuk kedermawanan ini justru memperburuk moral dan perilaku masyarakat miskin serta tidak

menyelesaikan persoalan kemiskinan dan bahkan dapat menciptakan ketergantungan kaum miskin pada bantuan.

2. Kegagalan program penanggulangan kemiskinan disebabkan kurangnya pemahaman tentang penyebab kemiskinan sehingga program-program penanggulangan yang dilakukan tidak didasarkan pada isu-isu kemiskinan, yang penyebabnya mungkin berbeda-beda di tiap daerah.

Mengacu pada kedua pendapat di atas, upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat masih mempunyai celah kegagalan. Di antaranya adalah kesalahan menentukan kelompok sasaran (penerima program) dan program yang tidak berakar pada kebutuhan masyarakat yang tentunya "khas" daerah setempat. Hal ini terjadi karena kebijakan yang sentralistis sehingga menggeneralisasi permasalahan yang ada dan kurang melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan programnya. Dalam hal ini, masyarakat tidak pernah diajak bicara tentang tujuan, kewajiban, manfaat dan lainnya yang akan mereka peroleh dari program pembangunan tersebut. Masyarakat hanya dianggap sebagai objek pembangunan – bukan sebagai subjek pembangunan yang mempunyai hak atas dirinya, mengetahui permasalahan dan memahami kondisi masyarakat dan lingkungannya.

Partisipasi masyarakat tampaknya menjadi satu pemicu dari gagalnya suatu program pembangunan. Berkaitan dengan partisipasi ini, Pambudi dalam Nugraha (2005:25) yang mengutip Widjajanti (praktisi TSP) mengungkapkan sebaiknya TSP menjalankan apa yang dikatakan sebagai *triple bottom line*. Namun untuk dikatakan telah menjalankan TSP dengan baik, perusahaan tidak harus melakukan semua bidang kegiatan tersebut namun yang penting adalah melakukan kegiatan semaksimal mungkin dengan menekankan keberlanjutan. Untuk itu harus dilakukan secara terencana dengan baik. Kegiatan TSP yang baik adalah hasil dari bertanya: apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat dan lingkungan sekitar? Upaya seperti ini akan lebih mengena dan tepat sasaran. Uraian di atas ingin menekankan bahwa suatu program pembangunan harus membuka kesempatan pada masyarakatnya untuk berpartisipasi.

Keberhasilan suatu program pengembangan usaha kecil dengan melibatkan partisipasi masyarakat telah dibuktikan dalam penelitian-penelitian di bawah ini. Hasil penelitian Sari (2006, 102-111) menemukan bahwa partisipasi masyarakat sangat mendukung keberhasilan program TSP dan *sustainable* perusahaan karena mendapat dukungan penuh masyarakat. Dalam perencanaan, PT Bogasari menerima masukan program dari masyarakat seperti program-program pinjaman modal usaha, informasi pemasaran produk dan menyediakan fasilitas berlatih. Selain itu, dalam pelaksanaannya juga melibatkan *stakeholders* terkait antara lain Dinas Kesehatan dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan /BPOM dan Departemen Tenaga Kerja dan Kementrian Negara Koperasi dan UKM. Upaya ini sangat menguntungkan kedua belah pihak terutama masyarakat penerima bantuan karena telah mengatasi permasalahan kebutuhan mereka.

Hal senada diungkapkan Hizbullah (1998:111-124). Penelitian ini mengungkapkan bahwa keberhasilan program Kelompok Usaha Bersama ini terjadi karena adanya partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat tumbuh karena adanya manfaat yang didapat dalam kegiatan tersebut seperti dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan adanya kebutuhan pengembangan diri seperti pengetahuan dan ketrampilan yang dapat dijadikan bekal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam jangka panjang.

Dari uraian di atas terlihat arti pentingnya partisipasi terutama untuk menemukan permasalahan utama masyarakat. Dasar utama dari adanya partisipasi dalam suatu program adalah bahwa program tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan mereka. Hal ini sejalan dengan pandangan Kotler (2005:238-239) tentang *best practices* pelaksanaan TSP di mana program harus didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan masalah sosial yang berkembang. Di sini terlihat arti pentingnya komunikasi antara pemberi program (perusahaan) dan penerima program (masyarakat) yaitu dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan program - baik ketika akan merumuskan masalah, menentukan kegiatan yang akan dipilih, pelaksanaan hingga evaluasi program. Pelibatan ini akan menciptakan dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap program kegiatan, dan dalam jangka panjang juga menciptakan rasa untuk tetap memelihara program kegiatan atau bantuan yang

diberikan. Dengan demikian, melalui partisipasi masyarakat diharapkan masyarakat mendapatkan manfaat nyata dan perusahaan diuntungkan dengan dapat terus menjalankan bisnisnya dengan rasa aman – tanpa ada gangguan dan resistensi dari lingkungannya.

Meskipun didukung oleh kebijakan/komitmen akan partisipasi masyarakat serta dukungan dana dari perusahaan ternyata tidak cukup untuk menjalankan TSP. Hal ini bisa dilihat dari penelitian Irvan (2004:146-166) di daerah operasi PT Pertamina EP. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa pelaksanaan TSP di Bajubang (Jambi) kurang melibatkan partisipasi masyarakat setempat baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan. Program dan bantuan yang berkaitan dengan sumbangan perusahaan selama ini hanya menempatkan masyarakat sebagai objek penerima bantuan – walaupun bantuan tersebut diberikan berdasarkan proposal masyarakat kepada perusahaan. Keterlibatan masyarakat hanya sebatas pada persiapan dan pelaksanaan program dengan melibatkan tokoh masyarakat yaitu ketua RT/RW setempat. Akibatnya, program yang dilakukan perusahaan tidak menyentuh substansi masalah yang ada di masyarakat. Selain itu, penelitian tersebut mengungkapkan keluhan masyarakat bahwa bantuan yang diberikan menjadi sia-sia karena bukan merupakan kebutuhan masyarakat setempat. Hal ini menunjukkan masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam program TSP di salah satu area operasi PT Pertamina ini.

Dengan melihat perkembangan usaha kecil khususnya perajin kulit yang cukup baik di kelurahan Kota Wetan dan kabupaten Garut umumnya dan pentingnya partisipasi dalam pelaksanaan suatu program maka penelitian ini mencoba melihat bagaimana partisipasi masyarakat dalam program TSP – dalam hal ini partisipasi perajin kulit dalam Program Kemitraan. Alasan untuk meneliti tentang Program Kemitraan dan partisipasi ini adalah:

1. Pemilihan Program Kemitraan (yang menjadi bagian dari program PKBL) ini – selain karena sifatnya pemberdayaan masyarakat seperti telah diuraikan di atas – adalah karena Program Kemitraan ini secara formal-struktural didasari oleh kebijakan pemerintah (lihat Irvan, 2004:73-75) sehingga akan mencerminkan kebijakan sosial perusahaan sebagai wujud

kepatuhan pada kebijakan pemerintah/kementrian BUMN, dan di sisi lain kehadiran perusahaan di tengah masyarakat akan menguji kepedulian sosial perusahaan. Selain itu, PKBL mengurus pendanaan yang tidak sedikit dan harus dipertanggung jawabkan.

2. Penulis belum menemukan penelitian sejenis yang mengulas partisipasi masyarakat secara khusus dalam pelaksanaan TSP khususnya program pengembangan usaha kecil. Untuk itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam Program Kemitraan - khususnya di Area Kamojang.

Untuk mendapatkan gambaran yang akurat, dalam penelitian ini partisipasi dilihat dari dua sudut yaitu perusahaan (pemilik/pelaksana program) dan mitra binaan perajin kulit (penerima program). Selanjutnya, diharapkan dapat diketahui titik temu jika terdapat faktor-faktor pendorong dan penghambat (dari perusahaan dan masyarakat) dalam menumbuhkan partisipasi untuk perbaikan program. Namun sebelum itu, diuraikan dahulu pelaksanaan Program Kemitraan yang dilakukan PT Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang.

Dengan demikian, penelitian ini mencoba menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut: 1. Bagaimana pelaksanaan Program Kemitraan yang dilakukan PT Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang?, 2. Bagaimana partisipasi mitra binaan perajin kulit dalam Program Kemitraan tersebut?, dan 3. Faktor-faktor apa yang mendorong dan menghambat partisipasi mitra binaan perajin kulit dalam Program Kemitraan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan gambaran permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan pelaksanaan Program Kemitraan yang dilakukan PT Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang.

2. Mendeskripsikan partisipasi mitra binaan perajin kulit dalam pelaksanaan Program Kemitraan yang dilakukan PT Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang.
3. Mengidentifikasi faktor-faktor pendorong dan penghambat partisipasi mitra binaan perajin kulit dalam pelaksanaan Program Kemitraan yang dilakukan PT Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik bagi pengembangan ilmu (akademis) maupun manfaat praktis.

D.1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pemikiran dan pemahaman tentang konsep TSP, Program Kemitraan dan partisipasi mitra binaan dalam pelaksanaan Program Kemitraan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi penelitian terkait selanjutnya.

D.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perusahaan - baik dalam perbaikan kebijakan maupun praktik pelaksanaan Program Kemitraan, memberikan masukan akan pentingnya partisipasi mitra binaan dalam Program Kemitraan – bagi kelangsungan program dan keberlanjutan perusahaan, dan memberikan masukan bagi institusi-institusi yang bergerak dalam *community development* akan arti pentingnya partisipasi masyarakat untuk keberhasilan suatu program.

E. Metode Penelitian

E.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2006:6), penelitian kualitatif adalah:

“ .. penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan secara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah”

Selanjutnya dikatakan Moleong (2006:7), bahwa penelitian kualitatif dipakai antara lain untuk memahami suatu proses, memahami suatu fenomena secara lebih mendalam dan menggali masalah-masalah yang sensitif. Dengan demikian, penelitian kualitatif akan menghasilkan data yang sangat spesifik. Untuk itu sesuai dengan tujuan penelitian ini, penelitian ini mendeskripsikan pelaksanaan Program Kemitraan, partisipasi mitra binaan perajin kulit dalam Program Kemitraan dan faktor-faktor pendorong dan penghambat partisipasi sehingga dibutuhkan penggalan informasi secara mendalam. Selain itu juga dapat menggali masalah-masalah sensitif. Masalah TSP bisa dianggap sebagai masalah sensitif bagi perusahaan dan masyarakat. Perusahaan – dengan segala bantuan yang sudah diberikan - tidak mau di “cap” salah dan gagal dalam menjalankan programnya. Sebaliknya masyarakat akan selalu merasa tidak puas dan menganggap perusahaan setengah hati dalam membantu masyarakat.

Untuk itu, penelitian kualitatif ini sangat menekankan pentingnya peranan manusia sebagai alat pengumpul data utama. Hal ini karena manusia (peneliti) sangat memungkinkan mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan, berhubungan dengan responden/objek lainnya dan manusia pula yang mampu memahami kaitan kenyataan-kenyataan di lapangan. Selain itu, hanya manusia pula yang dapat menilai dan menyadari apakah kehadirannya menjadi faktor pengganggu dan dapat mengatasinya (Moleong, 2006:9).

E.2. Jenis Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu mendeskripsikan pelaksanaan dan partisipasi mitra binaan dalam Program Kemitraan serta menggali faktor-faktor pendorong dan penghambat partisipasi tersebut. Jenis penelitian ini, mengutip Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2000:4), menghasilkan jenis penelitian (data) deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

E.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Ada beberapa pertimbangan mengapa PT Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang diangkat untuk diteliti pelaksanaan TSP-nya, khususnya pada Program Kemitraan yaitu:

1. Sepanjang pelaksanaan program bantuan usaha kecil ini, hampir separuh mitra binaan yang mendapat bantuan program ini gagal dalam menjalankan usahanya (lihat hal. 13). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menemukan permasalahan tersebut terutama terkait dengan pelaksanaan program dan partisipasi mitra binaan.
2. Usaha kecil perajin kulit di kelurahan Kota Wetan dan kabupaten Garut cukup berkembang dengan banyaknya jumlah usaha kecil dan tenaga kerja yang diserap (lihat hal 12-13). Selain itu, sektor kulit merupakan salah satu komoditi unggulan di Garut dan bahkan di kelurahan Kota Wetan terdapat perkampungan di mana setiap keluarga bekerja sebagai penjahit jaket kulit. Dengan demikian, bantuan Program Kemitraan ini perlu mendapat perhatian untuk memberdayakan masyarakat di sekitar lingkungan perusahaan.
3. Ada kebijakan dan standar pelaksanaan Program Kemitraan (dan PKBL umumnya) di PT Pertamina sehingga pelaksanaan Program Kemitraan di Area Kamojang dapat dijadikan model pelaksanaan Program Kemitraan di Pertamina pada umumnya.

Waktu penelitian, pengumpulan data dimulai dari tanggal 18 Februari hingga 7 Maret 2008. Pengumpulan data ini dilakukan setelah menjalani serangkaian persiapan penelitian berupa penulisan proposal penelitian.

E.4. Teknik Pemilihan Informan

Untuk memperoleh informasi yang akurat sangat ditentukan oleh pemilihan nara sumber (informan). Menurut Moleong (2006:132), informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi/kondisi latar penelitian serta mempunyai pengalaman/pengetahuan tentang latar penelitian. Untuk itu maka teknik pengambilan sampel penelitian dilakukan melalui teknik *purposive sampling* di mana informan ditentukan oleh peneliti dengan kriteria sesuai dengan tujuan penelitian. Hal ini karena informan mempunyai informasi yang dibutuhkan untuk memahami masalah penelitian.

Informan dari perusahaan adalah: 1. Kepala Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Area Kamojang yang mengetahui kebijakan Program Kemitraan yang digariskan pusat (PT Pertamina). Dalam pelaksanaannya, Area Kamojang menjadi ujung tombak dan bertanggung jawab langsung dalam pelaksanaan Program Kemitraan di wilayahnya. 2. Petugas Lapangan adalah orang yang berhubungan langsung dengan mitra binaan dalam pelaksanaan Program Kemitraan seperti melakukan survey untuk menentukan layak/tidaknya seseorang mendapatkan bantuan Program Kemitraan dan melakukan pembinaan.

Sedangkan informan dari masyarakat, informasi diperoleh dari: 1. Tokoh masyarakat sebagai orang yang dekat dan dipercaya warganya seperti Lurah. Lurah merupakan pihak yang dilibatkan dalam pelaksanaan program yang bersifat *top-down* – paling tidak dalam hal perizinan sehingga diharapkan mengetahui prosedur awal pelaksanaan Program Kemitraan yang melibatkan warganya. 2. Masyarakat penerima bantuan Program Kemitraan – dalam hal ini mitra binaan perajin kulit - merupakan pihak yang terlibat langsung dan yang merasakan manfaat dari program ini.

Untuk perajin kulit yang mengikuti Program Kemitraan (mitra binaan), kriteria sebagai informan adalah penerima bantuan pinjaman dana Program Kemitraan yang telah mengikuti program minimal satu periode yaitu minimal selama 3 tahun. Dalam satu periode ini (sebagai jangka waktu pelaksanaan program) diawali dari saat pengajuan proposal pinjaman, akad kredit pinjaman dengan perusahaan hingga melunasi pinjaman dan mengikuti program pembinaan. Hal ini – sesuai dengan tujuan penelitian ini - untuk melihat partisipasi mitra binaan selama mengikuti Program Kemitraan sehingga informan di sini adalah mereka yang telah menerima bantuan pinjaman dana dan pembinaan usaha serta telah melalui tahapan pembinaan dari Program Kemitraan.

Saat ini, mitra binaan Pertamina Area Kamojang khususnya perajin kulit berjumlah 14 mitra binaan – selain itu ada perajin bordir, tikar mendong, kotak souvenir. Berdasarkan kriteria di atas, yaitu telah mengikuti Program Kemitraan minimal 1 periode terdapat 6 mitra binaan. Dari 6 mitra binaan ini – karena 2 mitra binaan menolak menjadi informan dan informasi yang diperoleh telah mencukupi maka informasi digali dari 4 mitra binaan kulit sebagai informan penelitian ini. Mereka itu adalah 2 mitra binaan berhasil dan 2 mitra binaan kurang berhasil.

Tentang jumlah informan mitra binaan perajin kulit ini, penentuan informan dianggap telah memadai bila telah sampai kepada taraf *redundancy* (datanya telah jenuh, ditambah sampel lagi tidak memberi informasi yang baru). Ini berarti, dengan menggunakan informan selanjutnya boleh dikatakan tidak lagi diperoleh tambahan informasi baru yang berarti (Sugiyono, 2005:55)

Dalam perkembangannya, peneliti menambah nara sumber lain yaitu dari kantor Dinas Koperasi, dan Dinas Perdagangan dan Industri. Informan ini merupakan pihak yang terkait dengan usaha kecil terutama dari segi pembinaan usaha kecil. Di bawah ini adalah tabel tentang informan penelitian dan informasi yang ingin diperoleh.

Tabel 1.2: Informan Penelitian dan Informasi Yang Dicari

No	Informan	Informasi Yang Dicari	Jumlah
1.	Kepala PKBL/Humas	Kebijakan tentang Program Kemitraan, hubungan dengan instansi terkait dan tenaga pelaksana Program Kemitraan	1
2.	Petugas Lapangan	Pelaksanaan Program Kemitraan dan partisipasi mitra binaan dalam program tersebut, faktor pendorong dan penghambat partisipasi mitra binaan, dan harapan terhadap Program Kemitraan	1
3.	Mitra binaan perajin kulit	Pelaksanaan Program Kemitraan dan partisipasi mitra binaan dalam program tersebut, faktor pendorong dan penghambat partisipasi mitra binaan, dan harapan terhadap Program Kemitraan dan perusahaan	4
4.	Tokoh Formal: Lurah	Mekanisme dan teknis pelaksanaan bantuan-bantuan perusahaan termasuk bantuan usaha kecil, tanggapan dan harapan terhadap usaha kecil dan perusahaan	1
5.	Dinas Koperasi	Mekanisme dan teknis pelaksanaan bantuan-bantuan perusahaan termasuk bantuan usaha kecil, tanggapan dan harapan terhadap usaha kecil dan perusahaan	1
6.	Dinas Industri Perdagangan	Mekanisme dan teknis pelaksanaan bantuan-bantuan perusahaan termasuk bantuan usaha kecil, tanggapan dan harapan terhadap usaha kecil dan perusahaan	1
Total			9

E.5. Tehnik Pengumpulan Data

Menurut Lofland dan Lofland (1984) dalam Moleong (2006:157), sumber data dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu data primer berupa kata-kata, tindakan yang tercakup dalam wawancara dan observasi, serta data sekunder berupa dokumen tertulis dan foto-foto.

E.5.1. Studi Kepustakaan

Bentuk dari studi kepustakaan ini adalah berupa data sekunder yang diperoleh melalui literatur seperti buku, majalah, surat kabar, hasil penelitian dan dokumen lainnya. Maksud dari studi kepustakaan ini adalah untuk memberi dan menambah pemahaman penulis terhadap permasalahan penelitian, kerangka pemikiran dengan konsep-konsep yang dikembangkan dari teori-teori para ahli dan penelitian sebelumnya. Dengan demikian, studi kepustakaan akan membantu dan menggiring peneliti kepada tujuan penelitian yang lebih terarah.

E.5.2. Wawancara

Teknik wawancara menghasilkan data primer yang dibutuhkan dalam penelitian. Karena jenis penelitian adalah penelitian kualitatif yang membutuhkan penggalian informasi lebih mendalam maka dibutuhkan wawancara mendalam (*in-depth*) yang ditujukan langsung kepada informan dengan berpedoman pada pedoman wawancara (*interview guide*). Bentuk dari pedoman wawancara adalah pedoman wawancara tidak berstruktur yang memuat garis besar dari pertanyaan penelitian sehingga diharapkan wawancara bisa lebih berkembang. Tujuan yang diharapkan dari tehnik wawancara tidak berstruktur ini adalah agar bisa menggali dan memperoleh lebih dalam informasi tentang semua aspek-aspek yang berkaitan dengan masalah penelitian sesuai dengan tujuan penelitian.

E.5.3. Foto

Pemakaian foto dapat menunjang dan memperjelas data yang sudah diperoleh. Namun pemilihan foto/gambar sebagai sumber data perlu dilakukan dengan seksama (Irawan,2006:72). Jika foto/gambar tersebut adalah hasil karya orang lain maka penggunaannya perlu hati-hati karena mungkin terjadi perbedaan/kesalahan penafsiran antara peneliti dan si pembuat foto sehingga akan mempengaruhi analisa suatu data. Foto-foto dalam penelitian ini memperlihatkan kondisi/suasana lingkungan kerja mitra binaan perajin kulit.

E.6. Teknik Analisa Data

Analisa data dilakukan dengan mengolah data yang sudah diperoleh dari berbagai sumber melalui teknik pengumpulan data tersebut di atas. Dari pemahaman Patton (1980) serta Bogdan dan Taylor (1975), Moleong mensintesis (2006:280-281) bahwa analisa data merupakan “proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.” Mengorganisasikan data dilakukan setelah terkumpul data - baik berupa catatan lapangan dan komentar peneliti, foto, dokumen, artikel dan lainnya.

Secara umum proses analisa data tersebut meliputi 4 tahapan yaitu (Moleong,2006:288-289):

1. Reduksi Data. Pada tahap ini dilakukan identifikasi data-data dalam satuan-satuan tema yang bermakna yang terkait dengan fokus dan masalah penelitian. Setelah satuan-satuan tema ditemukan diberi kode agar dapat ditelusuri data satuannya dan sumbernya.
2. Kategorisasi. Tahap ini diawali dengan memilah-milah setiap satuan ke dalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan dalam satu kategorisasi. Kemudian setiap kategori diberi nama atau label.
3. Sintesisasi. Ini artinya mencari kaitan antara satu kategori dengan kategori lainnya. Lalu kaitan antara satu kategori dengan kategori lain tersebut diberi nama atau label lagi.
4. Menyusun “hipotesis kerja.” Hal ini dilakukan dengan merumuskan suatu pernyataan yang proporsional. Hipotesa kerja ini sudah merupakan teori substantif yaitu teori yang berasal dan masih terkait dengan data. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa hipotesa kerja ini hendaknya terkait dan menjawab pertanyaan penelitian.

Lebih lanjut dikatakan oleh Miles dan Huberman (1992:15-21), proses ideal analisis data (mencakup reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan) dalam penelitian kualitatif adalah proses siklus dan interaktif yang terkait antara

pengumpulan data dan analisis data. Hal ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan atau kekurangan data yang didapat pada pengumpulan-pengumpulan data awal. Hasil reduksi data ini (mencakup apa yang dikatakan Moleong sebagai reduksi data, kategorisasi dan sintesa data) kemudian disajikan dalam berbagai bentuk seperti matrik, grafik, jaringan dan bagan. Dari sini, akan mudah melihat data-data yang sudah terkumpul dan menentukan apakah akan menarik kesimpulan yang benar atau masih mencari data baru/tambahan yang diperlukan.

Untuk mengecek kebenaran pernyataan informan, memperkecil bias dan kesalahan yang mungkin terjadi dalam pernyataan yang disampaikan informan maka dilakukan pengecekan kembali kepada informan lain. Dalam hal ini, tentang pelaksanaan Program Kemitraan dilakukan pengecekan pada mitra binaan – penerima program. Sedangkan untuk koordinasi yang dilakukan Program Kemitraan Area kamojang ke pemerintahan daerah dilakukan pengecekan ke Lurah, Dinas Koperasi dan Dinas Industri dan Perdagangan.

F. Sistematika Penulisan

Tesis ini terdiri dari 6 bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab 1. Pada bab ini diuraikan seputar latar belakang pemikiran tentang penelitian ini seperti latar belakang masalah, permasalahan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan lainnya.

Bab 2. Bagian ini memuat latar belakang dan kerangka pemikiran yang menjadi pijakan dalam memahami konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini seperti konsep-konsep: Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP), partisipasi dan usaha kecil.

Bab 3. Bagian ini mendeskripsikan gambaran umum tentang perusahaan PT Pertamina (Persero) terutama terkait dengan kebijakan tentang TSP: visi, misi, sejarah program TSP dan program-program yang dijalankan – termasuk kebijakan tentang program pengembangan ekonomi yaitu Program Kemitraan dengan usaha

kecil dan gambaran seputar pelaksanaan Program Kemitraan di lapangan. Selain itu juga gambaran umum lokasi penelitian yaitu kelurahan Kota Wetan dan kabupaten Garut di mana mitra binaan perajin kulit Area kamojang – yang menerima bantuan pinjaman dana Program Kemitraan tinggal dan membuka usaha di sentra kerajinan kulit. Data-data tersebut diharapkan dapat menunjang hasil penelitian ini.

Bab 4. Bagian ini mendeskripsikan hasil penelitian yang didapat dari lapangan mengenai pelaksanaan Program Kemitraan, partisipasi mitra binaan dan faktor-faktor pendorong dan penghambat partisipasi dalam pelaksanaan Program Kemitraan.

Bab 5. Bagian ini memuat analisa penelitian yang dikaitkan dengan konsep-konsep utama yang dipakai seperti pemberdayaan, partisipasi, kesejahteraan sosial dan tanggung jawab sosial.

Bab 6. kesimpulan dan saran bagi perbaikan/peningkatan Program Kemitraan sebagai sumbangan pemikiran terhadap permasalahan yang dihadapi.